

Jalan Menuju Perubahan: Perjalanan Transparansi Infrastruktur di Indonesia

Sejak tahun 2019, CoST telah mendukung para mitra di Indonesia pada tingkat subnasional yang dimulai dengan bergabungnya Kabupaten Lombok Barat sebagai anggota. Melihat keberhasilan awal Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian bergabung dengan CoST pada tahun 2024.

CoST – the Infrastructure Transparency Initiative (Inisiatif Transparansi Infrastruktur) adalah organisasi nirlaba global terkemuka yang bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa ketika pemerintah membelanjakan dana untuk infrastruktur, prosesnya transparan, dana digunakan secara efisien, dan infrastruktur yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun anggaran infrastruktur nasional Indonesia terus meningkat dan melampaui USD 24 miliar pada tahun 2024¹, Indonesia tetap menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang diproyeksikan hampir 40% pada periode 2025–2029². Risiko korupsi yang persisten semakin mengancam efisiensi dan kualitas investasi skala besar. Dalam konteks ini, Indonesia tidak mampu menoleransi inefisiensi maupun pengambilan keputusan yang tidak transparan. Pemerintah subnasional seperti Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat memainkan peran penting dalam melindungi dana publik serta memperkuat kepercayaan investor untuk menarik pembiayaan tambahan dari sektor swasta dan multilateral guna memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.

Kisah kesuksesan ini menunjukkan bagaimana, melalui pendekatan CoST, Lombok Barat dan Nusa Tenggara Barat berhasil membangun budaya transparansi yang menghasilkan perbaikan nyata pada jalan, sarana air bersih dan sanitasi, sekolah, serta rumah sakit.



¹ <https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-construction-sector-remains-sturdy>

² Target infrastruktur nasional tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Dari total kebutuhan sekitar USD 116,74 miliar, anggaran nasional dan daerah hanya mencakup sekitar 60,5%.

5 Pelajaran Utama

1. Keberhasilan lokal dapat memicu reformasi yang lebih luas dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi Menunjukkan hasil nyata di tingkat kabupaten menciptakan kepercayaan serta model praktis untuk adopsi di tingkat provinsi. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan tersebar secara geografis, pendekatan CoST dapat diperluas ke pemerintah subnasional tanpa memerlukan mandat nasional
2. Membangun di atas platform tata kelola yang sudah ada mempercepat perubahan Mengintegrasikan pendekatan CoST ke dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RTTF) yang telah ada mencegah duplikasi dan membangun momentum. Memperkuat serta memperluas platform yang sudah berfungsi terbukti lebih efektif dibanding membangun struktur baru dari awal.
3. Data hanya menciptakan nilai jika digunakan, tidak hanya untuk dipublikasikan Peralihan dari publikasi data dasar ke publikasi terstruktur OC4IDS; penggunaan dasbor analitik; tinjauan independen; pemantauan proyek oleh masyarakat sipil; Indeks Transparansi Infrastruktur (ITI); serta pelatihan media, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam penggunaan data menunjukkan bahwa ketika transparansi dikaitkan dengan pengambilan keputusan, penetapan prioritas anggaran, dan tindakan korektif, maka dampak nyata dapat tercapai.
4. Keterlibatan multi-stakeholder berkelanjutan dapat mengubah cara kerja pemerintah melampaui inisiatif individual Pendekatan CoST mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, media, dan kelompok marjinal. Hal ini mengubah hubungan kerja dan menanamkan budaya pemecahan masalah bersama—mulai dari penyusunan peraturan hingga penguatan penanganan pengaduan—sehingga keterbukaan menjadi bagian dari tata kelola sehari-hari, bukan kewajiban berbasis donor.
5. Lingkungan pendukung yang kuat menjadi fondasi aksi transparansi yang berkelanjutan Penerbitan keputusan yang mewajibkan publikasi data INTRAS dan pembentukan tim data khusus mengubah transparansi dari pilihan sukarela menjadi praktik yang terlembagakan. Hasil ITI Lombok Barat—tertinggi pada kategori “lingkungan pendukung”—menunjukkan bagaimana formalisasi transparansi mendukung kinerja jangka panjang.

Membangun di atas platform multistakeholder yang sudah ada



Imam Arief Putrajaya, Manager CoST West Lombok Manager, melakukan interview dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum untuk Penyusunan Index Transparansi Infrastruktur (ITI)

Kolaborasi multistakeholder merupakan inti pendekatan CoST. Di Lombok Barat, fondasi tersebut telah tersedia. Pengajuan keanggotaan CoST dikembangkan dan diajukan bukan oleh satu dinas saja, melainkan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).

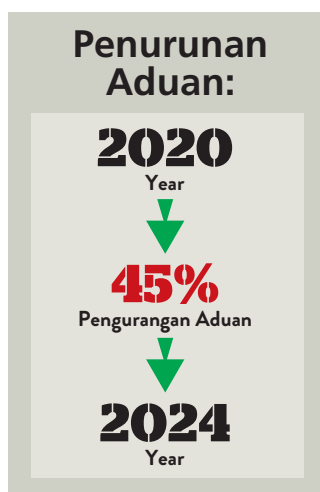
FLLAJ adalah forum resmi pemerintah yang didukung awal keaktifannya melalui program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) dan penerusnya Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), yang merupakan bagian dari Kemitraan Infrastruktur Indonesia–Australia dibawah proyek pilot PRIM, FLLAJ menyadari nilai dari penerapan penuh pendekatan CoST melalui keanggotaan resmi.

Bergabung dengan CoST menjadi titik balik penting. FLLAJ berkembang dari forum pengaduan jalan yang hanya beroperasi selama program pendanaan eksternal berlangsung, menjadi platform akuntabilitas berkelanjutan. Mandatnya diperluas dari pengaduan jalan ke berbagai sektor infrastruktur, termasuk sekolah dan pelabuhan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih luas terkait kebutuhan dan penyediaan infrastruktur.

Keanggotaan juga diperluas untuk secara resmi mencakup masyarakat sipil, perwakilan kelompok marjinal seperti PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), media, serta kehadiran sektor swasta yang lebih kuat—berkembang dari satu perwakilan bisnis menjadi beberapa peserta, termasuk penyedia air, listrik, telekomunikasi, dan kontraktor. Hal ini guna memastikan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam kontribusinya untuk pengambilan keputusan terkait infrastruktur.



CoST Technical Adviser, Hamish-Goldie Scot, bertemu perwakilan pemerintah NTB



Saat ini, Kelompok Multipihak (MSG) Lombok Barat—yang masih beroperasi dengan nama FLLAJ—menghimpun 19 anggota pemerintah dan 22 anggota non-pemerintah. Kelompok yang lebih beragam dan berkapasitas ini menumbuhkan budaya pemecahan masalah secara kolaboratif. Instansi pemerintah kini bekerja lintas sektor, memecahkan masalah bersama, dan berfokus pada solusi daripada saling menyalahkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meyakini bahwa perubahan ini berkontribusi pada penurunan pengaduan masyarakat terkait infrastruktur, dari 29 pengaduan pada 2020 menjadi 16 pada 2024.

Selain jumlahnya menurun, jenis pengaduan juga berubah. Jika sebelumnya berfokus pada kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan rusak, pengaduan terbaru lebih banyak terkait layanan pendukung seperti pengelolaan sampah. Perubahan ini mencerminkan pendekatan yang semakin matang terhadap investasi dan pengawasan infrastruktur.

De la publicación de datos al uso de datos

Sebelum bergabung dengan CoST, Standar Data Internasional CoST telah diintegrasikan ke dalam program PRIM bersama lebih dari 300 mekanisme tata kelola. Langkah-langkah ini membantu mengidentifikasi pembengkakan biaya, memperbaiki inefisiensi pengadaan, dan menghasilkan penghematan biaya sebesar 5,29% pada periode 2016–2019³.

³ Setara dengan sekitar Rp6,3 miliar (USD 385.000) dari total anggaran sebesar Rp119 miliar (sekitar USD 7,3 juta). Penghematan ini dihitung dengan membandingkan total anggaran dengan biaya aktual yang dikeluarkan, menggunakan berbagai sumber data, termasuk sumber pemerintah dan akademik.

Berdasarkan fondasi tersebut, Lombok Barat bergabung dengan CoST untuk semakin memperkuat kualitas, verifikasi, dan pemanfaatan data infrastruktur guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada Juli 2021, Lombok Barat mencapai tonggak penting dengan meluncurkan platform publikasi data bernama [INTRAS](#), yang menerapkan standar data internasional CoST yang diperbarui (OC4IDS). Standar ini membantu publikasi informasi proyek infrastruktur yang jelas, terstruktur, dan dapat dianalisis, mencakup seluruh tahapan siklus proyek serta pengadaan kontrak terkait.



Hamish Goldie-Scot dan Lalu Sahabuddin, Strategic advisor untuk Indonesia, bertemu perwakilan pemerintah NTB sebelum peluncuran keanggotaan CoST NTB



Sejak peluncuran INTRAS Lombok Barat, data telah dipublikasikan untuk 2.500 proyek di sektor jalan, rumah sakit, dan sekolah, dengan total nilai USD 135 juta per Februari 2026. Untuk memastikan kualitas publikasi data, Lombok Barat melatih hampir 100 pejabat pemerintah dan membentuk tim data infrastruktur publik khusus yang bertanggung jawab dalam mempublikasikan serta memelihara data infrastruktur.

CoST memfasilitasi berbagi pengalaman dan praktik baik antar anggota. Sebagai bagian dari usaha tersebut, Lombok Barat menjadikan perangkat lunak INTRAS sebagai open source, sehingga teknologi INTRAS dapat direplikasi dan dikembangkan oleh pemerintah lain secara global.

Hal ini memungkinkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan cepat mengadaptasi dan menerapkan platform INTRAS Lombok Barat untuk investasi tingkat provinsi. Dalam waktu enam bulan setelah bergabung dengan CoST, NTB meluncurkan-- [INTRAS Nusa Tenggara Barat](#). Hal ini membantu percepatan kemajuan CoST NTB dan berhasil mempublikasikan data 952 proyek senilai USD 127 juta pada enam bulan pertama. Hingga Februari 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 2.531 proyek dengan nilai total USD 351 juta.

Untuk mendorong pemanfaatan data yang lebih luas, CoST Lombok Barat berdasarkan rekomendasi hasil Index Transparansi Infrastruktur (ITI) meluncurkan [INTRAS analytical dashboard](#) di awal 2024. Alat ini mengolah data INTRAS menjadi informasi real-time yang lebih sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan mendorong penggunaan data oleh masyarakat.

Data yang dipublikasikan telah digunakan oleh bagian perencanaan Sekretariat Daerah dan Dinas PUPR untuk mengidentifikasi wilayah yang kurang terdani, menyusun permohonan pendanaan ke pemerintah pusat, serta mendukung keputusan perencanaan daerah. Sebagai contoh, analisis data membantu menjadikan jalan Kuta–Keruak sebagai prioritas pembangunan pemerintah provinsi.

Lombok Barat juga menganalisis data tersebut dalam penyusunan perdana [independent review \(assurance report\) di tahun 2025](#). Pada saat peluncuran, Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa INTRAS telah dimanfaatkan untuk menghasilkan wawasan berharga

yang digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi hasil tinjauan independen serta memanfaatkan data tersebut untuk menyusun dan menerbitkan tinjauan independen secara tahunan guna membantu mengarahkan penetapan prioritas dan upaya reformasi di masa mendatang.

Membangun Kerangka Hukum Transparansi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB menyadari pentingnya kerangka hukum untuk melembagakan transparansi di sektor infrastruktur

Pada tahun 2024, keduanya menerbitkan regulasi : Kabupaten Lombok Barat mewajibkan publikasi data infrastruktur melalui INTRAS serta Provinsi NTB menetapkan pembentukan tim publikasi data.

Pada umumnya, penyusunan peraturan dilakukan melalui proses internal pemerintah. Namun, dalam hal ini terdapat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya melibatkan perwakilan dari berbagai perangkat daerah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi ini membantu memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan mencerminkan kebutuhan dan harapan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan dan komitmen bersama. Proses ini menunjukkan bagaimana pendekatan CoST mampu mengintegrasikan partisipasi publik dan praktik multipihak ke dalam praktik rutin penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai pentingnya regulasi tersebut tercermin dalam publikasi pertama [Index Transparansi Infrastruktur \(ITI\) Kabupaten Lombok Barat di 2023](#). Indeks tersebut mengevaluasi lingkungan pendukung bagi transparansi, kapasitas dan proses entitas pengadaan dalam mempublikasikan data serta melibatkan masyarakat, serta tingkat publikasi data yang aktual. Lombok Barat memperoleh skor⁴ tertinggi pada kategori “lingkungan pendukung”, di mana kerangka regulasi memainkan peran yang signifikan.

Penguatan keterlibatan publik untuk meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur

Melalui pendekatan CoST, kedua pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi rendahnya tingkat kepercayaan dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pertemuan secara rutin yang menyediakan forum bagi warga untuk menyampaikan pengaduan terkait proyek infrastruktur, dengan jumlah peserta hingga 30 orang pada setiap sesi.

Proyek Jalan Raya Lembar-Gerung Road merupakan proyek jalan regional dengan nilai lebih dari USD 734 ribu yang menghubungkan Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung di Kabupaten Lombok Barat. Selama pelaksanaan pekerjaan, informasi yang objektif yang disediakan melalui proses CoST membantu masyarakat setempat, melalui forum warga, untuk menyampaikan pertanyaan dan kekhawatiran terkait kualitas pekerjaan aspal serta keterlambatan pelaksanaan proyek. Sebagai hasil dari proses kolaboratif dan konstruktif tersebut, tindakan korektif telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam kontrak.

Pendekatan lainnya dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap proyek infrastruktur serta memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membantu seluruh pemangku kepentingan dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

⁴ Skor kategori lingkungan pendukung adalah sebesar 59,7/100, dibandingkan dengan skor kapasitas dan proses sebesar 31,36/100, keterbukaan informasi sebesar 27,24/100, serta partisipasi masyarakat sebesar 10,44/100.

Selama pelaksanaan peningkatan **Pasar Gunungsari di Kecamatan Gunungsari**, yang mencakup perbaikan fasilitas sanitasi dan drainase, masih terdapat permasalahan serius terkait genangan dan banjir. Banyak kepala desa serta organisasi masyarakat sipil setempat, termasuk Forum Masyarakat Transparan, telah menerima pelatihan dari CoST Lombok Barat mengenai pemantauan proyek infrastruktur daerah, termasuk pemanfaatan data yang dipublikasikan. Kapasitas tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah. Isu-isu tersebut dibahas dalam pertemuan RTTF, di mana disepakati perlunya dilakukan audit. Perwakilan media dalam kelompok tersebut juga didorong untuk melaporkan permasalahan secara objektif guna meningkatkan kesadaran publik. Tindak lanjut dari upaya tersebut menghasilkan revisi kontrak serta peningkatan pengawasan oleh Dinas Perdagangan. Sebagai hasilnya, kualitas pekerjaan ditingkatkan dan proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Kabupaten Lombok Barat juga memanfaatkan saluran komunikasi yang inovatif untuk melibatkan masyarakat. Salah satunya melalui penyelenggaraan serial podcast pemerintah yang mencakup berbagai episode yang [dipandu oleh Manajer CoST Lombok Barat](#), dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat serta mendorong partisipasi mereka terkait isu-isu infrastruktur.

Terakhir, melalui pelatihan kepada media, inisiatif ini turut memberdayakan jurnalis untuk memanfaatkan data infrastruktur yang dipublikasikan dalam rangka peliputan yang objektif; sebanyak 87,5% insan media yang telah mengikuti pelatihan melaporkan adanya peningkatan kemampuan dalam menulis artikel advokasi terkait isu-isu infrastruktur.



Baiq Yeni Satriani, Ketua FLLAJ 2025 dan H. Akhmad Saikhu, Seretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat pada peluncuran laporan Independen Review Lombok Barat bersama Prof. Agusdin

Katalis aksi untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik

Meskipun masih berada pada tahap awal di Indonesia, pendekatan CoST telah mulai memberikan peningkatan kualitas serta nilai manfaat atas penggunaan anggaran (value for money) dalam penyelenggaraan infrastruktur publik dalam konteks tata kelola yang terdesentralisasi. Untuk mendukung adopsi yang lebih luas, CoST bekerja untuk membentuk pusat-pusat keunggulan di antara anggota CoST di Indonesia guna berbagi pembelajaran, sumber daya dan teknologi terbuka, serta memberikan dukungan teknis.

Keberhasilan yang dicapai di **Kabupaten Lombok Barat** dan secara lebih luas di **Provinsi Nusa Tenggara Barat** telah menginspirasi daerah lain untuk mengikuti langkah serupa, dengan bergabungnya **Kabupaten Belitong** sebagai anggota CoST pada akhir tahun 2024. Selain itu, minat keanggotaan CoST juga terus meningkat dari daerah lain, termasuk Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo.

Apa yang bermula dari satu kabupaten kini menunjukkan potensi untuk membentuk pendekatan Indonesia terhadap transparansi infrastruktur secara lebih luas dan berskala nasional.